

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Keaslian Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Pertanyaan Penelitian	13
1.5 Manfaat Penelitian.....	13
1.6 Tujuan Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1 <i>Multiple Streams Framework</i>	17
2.1.1 Aliran masalah.....	18
2.1.2 Aliran kebijakan	20
2.1.3 Aliran Politik	22
2.1.4 Jendela kebijakan	23
2.1.5 <i>Policy entrepreneur</i>	24
2.2 Kerangka Berpikir	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Desain Penelitian.....	32
3.2 Sumber Data.....	32
3.3 Metode Pengambilan Data.....	34
3.4 Analisis Data.....	39
3.4.1 Operasionalisasi MSF.....	40
3.4.2 Prosedur <i>Coding</i> dan Pengembangan Tema.....	42
3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data.....	44
3.6 Batasan Penelitian.....	46
BAB IV TENTANG PMK NOMOR 218/PMK.04/2019.....	47
4.1 Kedudukan dan Dasar Hukum PMK 218/2019.....	48
4.2 Substansi Utama dan Ruang Lingkup Regulasi.....	49
4.3 Kebaruan Regulasi PMK 218/2019.....	51
4.3.1 Regulasi tunggal dan perluasan cakupan kegiatan.....	52
4.3.2 Integrasi fasilitas bea masuk dan PDRI dalam satu kerangka.....	53
4.3.3 Penyederhanaan tata laksana.....	54
4.3.4 Desain masa berlaku fasilitas dan perubahan keputusan.....	55
4.3.5 Tata laksana impor.....	56
4.3.6 Pengaturan pemindahtanganan dan pemusnahan barang fasilitas.....	57
4.3.7 Penguatan pengawasan dan kerangka sanksi.....	59
4.3.8 Sistem TI terintegrasi lintas K/L dan ketentuan peralihan.....	60
BAB V INTERAKSI ALIRAN MSF.....	61
5.1 Hasil Penelitian Interaksi Aliran MSF.....	62

5.1.1	Aliran Masalah	62
5.1.2	Aliran Kebijakan	70
5.1.3	Aliran Politik	80
5.2	Pembahasan	85
5.2.1	Masalah sebagai Konstruksi, Bukan Hanya Realitas Objektif	86
5.2.2	Temuan Audit sebagai <i>Focusing Event</i>	90
5.2.3	Instrumen Fiskal Berbasis Janji Layanan dan Digitalisasi	94
5.2.4	Politik Berprofil Teknokratik.....	99
5.2.5	Komitmen Janji Layanan sebagai Sinyal Politik.....	103
5.2.6	Politik Yurisdiksi antara DJBC dengan DJP	107
5.2.7	Aliran Administratif dan Teknologi	112
BAB VI JENDELA KEBIJAKAN		120
6.1	Hasil Penelitian Jendela kebijakan	121
6.1.1	Jenis dan Pemicu Jendela Kebijakan	121
6.1.2	Aksi Penggabungan Aliran	127
6.2	Pembahasan	129
6.2.1	<i>Public Hearing</i> sebagai <i>Coupling Arena</i>	130
6.2.2	Jendela kebijakan sebagai Proses Bertahap.....	136
6.2.3	<i>Coupling</i> Lintas Kebijakan	141
BAB VII <i>POLICY ENTREPRENEUR</i>		145
7.1	Hasil Penelitian <i>Policy Entrepreneur</i>	146
7.2	Pembahasan	151
7.2.1	<i>Policy entrepreneur</i> yang kolektif dan berbasis kelembagaan	151



7.2.2	<i>Policy entrepreneur</i> sebagai <i>Epistemic Broker</i>	154
BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI		159
8.1	Kesimpulan.....	159
8.2	Rekomendasi	162
DAFTAR PUSTAKA		164